

Budget Ratcheting on Realization of Sidoarjo Regency Government (Empirical Study on Sidoarjo Regency Government) *Budget Ratcheting Pada Realisasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo* (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo)

Anugerah Wahyu Fauzia ¹⁾, Sarwenda Biduri*²⁾

¹⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email : sarwendabiduri@umsida.ac.id

Abstract. *The budget in a democratic government describes the government's plan to spend public money. However, in the process of preparing and determining the budget, many are colored by the interests of agents, so it's prone to ratcheting. This research aims to determine the effect of local revenue on regional spending after the covid-19 pandemic and the influence of the relationship between local revenue and regional spending with budget ratcheting as a moderator. This research is quantitative method using secondary data. The population in this study is all government's organizations with a total sample is 48 government's organizations. This research uses classical assumption, simple linear regression analysis and moderate regeression analysis (MRA). The results of this research explain that local revenue has a positive effect on regional spending. It's means that more great the amount of local revenue so regional spending was higher too. Budget ratcheting doesn't moderate the relationship between local revenue and regional spending. This happened because the amount of local revenue decline during the covid-19 pandemic. So the Government make efforts to raise public economy by supporting the activities of community small business and developing potential sources of local revenue.*

Keywords - local revenue; regional spending; budget ratcheting

Abstrak Anggaran menggambarkan rencana pemerintah dalam membelanjakan uang rakyat. Akan tetapi dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran banyak diwarnai kepentingan agen sehingga rentan terjadi *ratcheting*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dengan belanja daerah paska pandemi *covid-19* serta pengaruh hubungan pendapatan asli daerah dengan belanja daerah dengan *budget ratcheting* sebagai pemoderasi. Metode penelitian ini kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Populasi penelitian ini adalah seluruh SKPD dengan sampel sebanyak 48 SKPD. Dalam penelitian ini dilakukan uji sumsi klasik, analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi moderat (MRA). Hasil penelitian ini menjelaskan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Artinya semakin banyak pendapatan asli daerah maka semakin tinggi belanja daerah. *Budget ratcheting* tidak memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah. Hal ini terjadi karena pendapatan asli daerah mengalami penurunan selama pandemi *covid-19*. Untuk itu Pemerintah membangkitkan perekonomian dengan mendukung kegiatan umkm dan mengembangkan potensi sumber pendapatan daerah.

Kata Kunci - Pendapatan asli daerah; belanja daerah; *budget ratcheting*

I. PENDAHULUAN

Indonesia secara resmi melakukan desentralisasi fiskal yaitu dimulai tanggal 1 Januari 2001. Hal ini bertujuan agar daerah mampu menciptakan aspek kemandirian. Daerah mendapatkan pelimpahan kewenangan di segala bidang, kecuali kewenangan di bidang pertahanan keamanan, yustisi, politik luar negeri, moneter dan keagamaan. Pemerintah pusat melimpahkan kewenangan kepada daerah dengan menyerahkan sumber-sumber pendanaan. Dengan adanya desentralisasi fiskal ini selanjutnya ditetapkan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah adalah memberikan tanggungjawab kepada daerah [1], untuk berkontribusi secara nyata dalam mengatur, menggali dan memanfaatkan sumber-sumber daya potensi yang ada pada daerah yang akan dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerahnya masing-masing [2]. Untuk itu Pemerintah Daerah diberikan kekuasaan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengalokasikan anggaran belanjanya sendiri.

Pemerintahan Daerah memiliki kekuasaan sendiri untuk menyusun, mengatur dan mengalokasikan anggaran belanja daerahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat [3]. Anggaran pemerintah daerah ini selanjutnya disebut dengan APBD yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah kemudian ditetapkan didalam Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari tiga

komponen, antara lain : pendapatan daerah meliputi : pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah, belanja daerah antara lain : belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, serta pembiayaan daerah, yaitu : penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Anggaran didalam pemerintahan demokratis menggambarkan rencana pemerintah dalam membelanjakan uang rakyat jadi didalam pelaksanaan anggarannya harus bersifat transparan dan akuntabel [4].

Penyusunan anggaran dalam pemerintahan berkaitan erat dengan aspek politik sehingga pemerintah dituntut agar pengelolaan anggaran bermanfaat secara sosial bagi masyarakat (akuntabilitas anggaran) [5]. Proses penyusunan anggaran sudah diundangkan akan tetapi dalam praktiknya masih terdapat dominasi kepentingan elit politik [6]. Hal ini rentan akan adanya *ratcheting* anggaran antara eksekutif sebagai pihak penyusunan anggaran dan legislatif sebagai pengambil kebijakan.

Eksekutif dan legislatif mengambil kesepakatan bersama mengenai arah tujuan dan kebijakan secara umum serta prioritas penganggaran untuk pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Eksekutif (Pemerintah Daerah) menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan menyerahkannya kepada legislatif (DPRD) untuk dipelajari dan dibahas secara bersama dan selanjutnya ditetapkan menjadi Perda APBD. Eksekutif dan legislatif mempunyai hubungan keagenan [7]. Pihak eksekutif dan legislatif sama-sama memiliki peluang untuk melakukan *ratcheting* terhadap anggaran. Eksekutif sebagai pihak penyusunan anggaran memiliki kelebihan informasi sehingga dapat melakukan *ratcheting* dengan memaksimalkan *utility* atau informasi untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan pihak legislatif dapat melakukan *ratcheting* pada saat pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pengesahan anggaran. Dalam proses pengesahan anggaran dapat terjadi tawar-menawar antara pihak eksekutif dan legislatif. Selain itu pihak legislatif seringkali melakukan tindakan "titipan" proyek pembangunan untuk daerah pemilihannya guna kepentingan masyarakat yang memilihnya sehingga terjadi ketimpangan pembangunan pada daerah-daerah pemilihan politisi tersebut. Maka dari itu pihak eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPRD) harus meningkatkan akuntabilitas kinerjanya, mengawasi dan memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perspektif keagenan yaitu jika kemampuan keuangan daerah dijadikan sebagai pengukuran kinerja dan pemberian tunjangan kinerja, maka akan muncul kesenjangan anggaran [8]. Target pendapatan asli daerah akan ditetapkan lebih rendah dari kemampuan/potensi riil daerah berarti eksekutif (pemerintah) cenderung akan menentukan target anggaran PAD yang minim. Apabila terjadi resesi, eksekutif (pemerintah) akan menaikkan pendapatannya yang sejalan dengan belanjanya yang membuat eksekutif (pemerintah) akan sulit menurunkan anggaran belanjanya yang terlanjur naik sejalan dengan kenaikan pendapatannya.

Pada akhir tahun 2019 wabah covid melanda dunia dan Maret 2020 wabah covid-19 terjadi di Indonesia. Hal ini menimbulkan perubahan ekonomi bukan hanya di Indonesia melainkan juga di dunia. Akibat wabah ini pendapatan asli daerah (PAD) di seluruh kabupaten/kota di Indonesia menurun. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar -2,07% pada tahun 2020. Ini berarti Indonesia mengalami *deflasi* karena pertumbuhan ekonomi yang kurang stabil. Pemerintah mengalami penurunan jumlah konsumsi dari 3,25% menjadi 1,94% [9]. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga mengalami penurunan PAD selama pandemi Covid-19. PAD Kabupaten Sidoarjo yang semula tahun 2019 Rp 1,8 triliun diturunkan Rp 341,8 miliar menjadi Rp 1,468 miliar pada tahun 2020 [10]. Pandemi Covid-19 ini berakibat pemerintah merevisi target pendapatan asli daerahnya pada tahun berjalan lebih rendah dibanding target tahun sebelumnya. Hal ini juga dapat diartikan bahwa pemerintah berupaya untuk menjaga performa kinerjanya agar selalu baik [11]. Sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan [12] tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, maka pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo optimis untuk menaikkan target Pendapatan Asli Daerahnya menjadi Rp 1,6 triliun dan sebesar Rp 1,8 triliun di tahun 2022 [13].

Berdasarkan penelitian diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah meningkatnya jumlah PAD paska pandemi covid diikuti dengan peningkatan belanja daerah? dan apakah *budget ratcheting* memoderasi hubungan antara PAD dan belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo?

Hubungan Antar Variabel Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah yaitu semua penghasilan yang didapat dari sumber-sumber di wilayah daerah itu sendiri berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku [14]. Pendapatan asli daerah menjadi faktor yang sangat penting dan dijadikan tolak ukur perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah. Salah satu pendapatan asli daerah yang paling besar bersumber dari pajak daerah. Jika realisasi pendapatan asli daerah mengalami penurunan, maka pemerintah perlu melakukan upaya guna mendorong kenaikan pendapatan asli daerahnya. Optimalisasi pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat terkait pembayaran pajak daerah, meningkatkan kinerja dan profesionalisme pegawai/ASN yang memungut pajak daerah, menyediakan dan memperbaiki sarana prasarana masyarakat, serta memanfaatkan kecanggihan informasi dan

teknologi untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat [15]. Pendapatan asli daerah dimanfaatkan untuk membiayai belanja daerah.

Belanja daerah dapat berpotensi dengan baik jika digunakan sepenuhnya untuk membiayai kepentingan masyarakat salah satunya untuk pembangunan daerah [16]. Apabila anggaran pendapatan asli daerah semakin tinggi maka anggaran belanja daerah juga akan semakin besar, hal ini diakibatkan karena terjadinya peningkatan pembangunan daerah. Kenaikan pendapatan daerah diikuti oleh kenaikan belanja daerah, hal ini sesuai pendapat dari [17]. Semakin tinggi PAD yang didapat oleh daerah maka semakin tinggi pula belanja yang dapat dibiayai oleh daerah itu sendiri [18]. Begitu juga dengan [8], [19] dan [20], mengemukakan hasil penelitiannya bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Berdasarkan pembahasan diatas, maka hipotesis pertama yang dapat diungkapkan dari penelitian ini yaitu:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah

Pengaruh *Budget Ratcheting* terhadap Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah

Ratcheting ialah salah satu aspek penganggaran yang dapat terjadi akibat target anggaran tahun berjalan dipengaruhi oleh sesilish antara target tahun sebelumnya dan realisasi tahun sebelumnya [21]. Jadi *budget ratcheting* ialah penentuan target dalam penyusunan anggaran dengan menggunakan informasi capaian kinerja anggaran tahun sebelumnya untuk pencapaian target di tahun mendatang yang bersifat menguntungkan [22]. Hal ini dikarenakan Pemerintah berupaya untuk memperbaiki capaian kinerjanya dengan cara memodifikasi target kinerja menjelang akhir tahun anggaran..

Eksekutif memiliki perilaku *oportunistik* dalam penyusunan anggaran yaitu dengan merevisi/mengubah realisasi anggaran pada tahun berjalan saat menjelang berakhirnya tahun anggaran [17]. Hal ini menunjukkan bahwa *ratcheting* terjadi dalam penganggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Apabila terjadi kenaikan realisasi anggaran pendapatan dibandingkan dengan target anggaran pendapatan di tahun sebelumnya, maka pemerintah akan meningkatkan anggaran belanja pada tahun berikutnya. Efek *ratchet* ini akan berdampak kerugian yang besar bagi keuangan daerah. Keadaan ini jelas berimbas secara langsung terhadap sistem penganggaran yang tidak efisien karena banyak anggaran yang dikeluarkan untuk mendanai program dan kegiatan yang kurang/tidak bermanfaat (terjadi pemborosan) sehingga untuk mengatasi problem tersebut pemerintah daerah memodifikasi realisasi anggaran pada tahun berjalan sebelum tahun anggaran berakhir.

Dalam penelitian dijelaskan bahwa setiap kenaikan PAD sebesar 1% menghasilkan peningkatan belanja daerah sebesar 87,2% [19]. Disini dapat terlihat bahwa *budget ratcheting* memiliki pengaruh untuk memperkuat hubungan antara PAD dan belanja daerah. Kondisi masa lalu dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan anggaran oleh pihak eksekutif sehingga memicu bias dalam pembuatan anggaran di masa mendatang. Pihak eksekutif hendaknya memiliki informasi yang lebih banyak mengenai pihak legislatif agar *budget ratcheting* tidak selalu terjadi di pemerintahan daerah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan di kabupaten/kota Cirebon menyatakan pada hipotesis pertama bahwa total belanja daerah secara signifikan dipengaruhi oleh PAD berarti PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah [16]. Setiap kenaikan PAD sebesar 1% akan menaikkan total belanja daerah sebesar 34,1%. Sedangkan pada hipotesis kedua didapat bahwa *budget ratcheting* berpengaruh terhadap hubungan antara PAD dan belanja daerah. Terdapat persamaan regresi yang naik dari 34,1 % menjadi 35,8%, maka dapat disimpulkan bahwa *budget ratcheting* memoderasi/memperkuat antara PAD dengan belanja daerah.

Peneliti lainnya juga menyatakan bahwa terdapat *ratcheting* anggaran dalam proses penetapan peraturan daerah tentang APBD [8]. Kecenderungan *oportunistik* dimiliki oleh lembaga perwakilan di daerah (DPRD) yaitu dengan cara mengusulkan kenaikan target penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah (PAD) yang selanjutnya kenaikan tersebut dimanfaatkan untuk mendanai alokasi belanja daerah yang bertujuan untuk pemenuhan kepentingan pribadi anggota dewan. Dengan demikian didapat kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah. Setiap kenaikan pada pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan jumlah anggaran belanja daerah. *Budget ratcheting* memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan belanja daerah, sesuai dengan hasil penelitian [23] terdapat bukti bahwa 50 (lima puluh) kota di Amerika Serikat melakukan *budget ratcheting*. Alokasi anggaran yang mempunyai varian positif akan berhubungan dengan meningkatnya anggaran pada tahun berikutnya sebaliknya alokasi anggaran yang mempunyai varian negatif tidak mempunyai hubungan dengan meningkatnya anggaran pada tahun berikutnya.

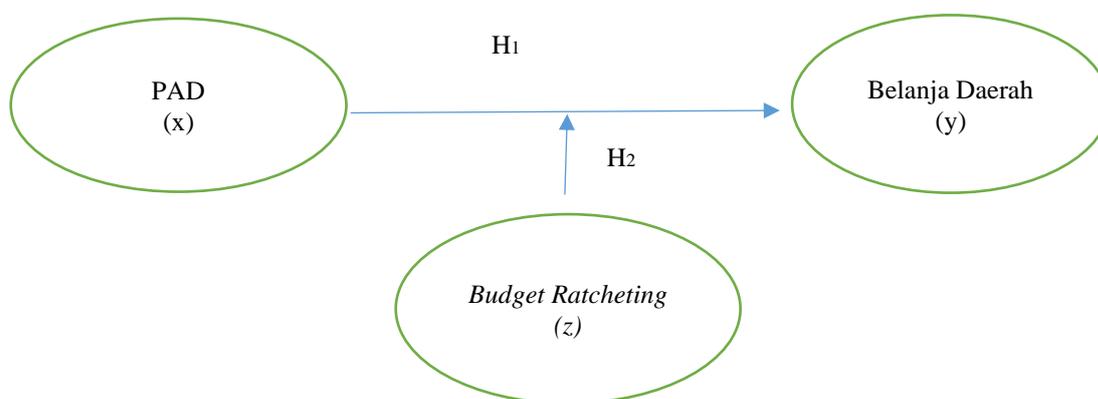
Terjadi *budget ratcheting* dalam penyusunan APBD di Korea Selatan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan [24]. Pihak eksekutif (Kepala Daerah) melakukan *ratcheting* anggaran pada saat penyusunan anggaran agar mendapatkan simpatisan dari masyarakat dengan cara mengalokasikan anggaran belanja daerah untuk melaksanakan program prioritas yang dijanjikan kepada masyarakat. pada saat pemilihan. Tingkat kekuasaan yang dimiliki Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) berpengaruh positif terhadap tingkat kenaikan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat. Hal ini berarti pejabat pemerintah daerah yang memiliki kekuasaan lebih dapat melakukan tawar menawar untuk mendapatkan anggaran yang lebih banyak dari pemerintah pusat.

Hasil yang berbeda didapat dari penelitian yang dilakukan oleh [25], [21], [22], [26] dan [27]. Penelitian oleh [25] menganalisis efek *budget ratcheting* terhadap peningkatan kualitas pendidikan pada lembaga pendidikan. Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa *budget ratcheting* berpengaruh negatif terhadap kualitas pendidikan, berarti kenaikan anggaran tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap kenaikan kualitas pendidikan, akan tetapi faktor-faktor lainlah yang berpengaruh terhadap kenaikan kualitas pendidikan, seperti : kualitas dan kuantitas proses pembelajaran, minat dan bakat yang dimiliki siswa, motivasi dalam belajar, sarana dan prasarana pembelajaran, dan lain sebagainya. Penelitian lain menjelaskan *budget ratcheting* tidak berpengaruh atau memperlemah hubungan pendapatan asli daerah dengan belanja modal [21]. Dalam penelitian lainnya juga didapat kesimpulan bahwa hubungan pendapatan asli daerah dengan belanja barang dan jasa diperlemah oleh *budget ratcheting*. *Budget Ratcheting* memiliki pengaruh negatif dan positif [22]. Dalam rasio kemandirian daerah, *budget ratcheting* berpengaruh negatif sedangkan pada rasio pertumbuhan pendapatan, *budget ratcheting* berpengaruh positif menurut [26], serta [27] dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa *budget ratcheting* memperlemah hubungan antara dana alokasi umum dan belanja modal.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka hipotesis pertama yang dapat diungkapkan dari penelitian ini yaitu:

H2 : *Budget Ratcheting* berpengaruh terhadap hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah

Berdasarkan hipotesis tersebut diatas, maka kerangka konseptual yang akan dijabarkan peneliti adalah sebagai berikut: adanya pengaruh variabel pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan variabel *budget ratcheting* sebagai pemoderasi.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 dan 2021. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui *website* Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (siksda.sidoarjokab.go.id), serta dari peraturan daerah tentang APBD.

Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 48 SKPD. Perangkat Daerah yang memiliki pendapatan sendiri di wilayah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 tercatat sebanyak 35 SKPD, sedangkan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 33 SKPD. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara *purposive sampling* dengan kriteria antara lain :

- Ketersediaan data.
- Mempunyai komponen PAD dan komponen belanja daerah.
- Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pasca covid-19 yaitu tahun 2020 dan 2021.

Tabel 1 Indikator Variabel

No.	Variabel	Indikator	Skala	Sumber Referensi
1	Pendapatan Asli Daerah (Variabel X)	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah • Retribusi Daerah • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan • Lain-lain PAD yang sah 	Nominal	[3]
2	Belanja Daerah (Variabel Y)	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja operasional • Belanja modal • Belanja tidak terduga • Belanja transfer 	Nominal	[6]
3	<i>Budget Ratcheting</i> (Variabel Z)	<ul style="list-style-type: none"> • PADt = Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan • PADt-1 = Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya • PADRt-1 = Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan • σ = konstanta • γ = koefisien regresi • ϵ = standar eror 	Rumus Model : $PADt - PADt-1 = \sigma + \gamma (PADRt-1 - PADt-1) + \epsilon$	[16] dan [28]

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear sederhana karena memiliki variabel bebas lebih dari satu yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel moderasi. Sebelum melakukan uji hipotesis peneliti akan memeriksa validitas dan reliabilitas instrumen. Kemudian dilakukan analisis regresi linier sederhana yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah. Sedangkan untuk mengetahui apakah *budget ratcheting* memoderasi peningkatan PAD dan belanja daerah digunakan metode *moderated regression analysis (MRA)* yaitu aplikasi yang digunakan untuk menguji interaksi regresi linear sederhana dimana dalam persamaan regresinya terdapat unsur interaksi (perkalian dua/lebih variabel) [29].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, dokumen, arsip maupun lainnya yang berkaitan [30]. Data sekunder dari penelitian ini yaitu berupa laporan realisasi anggaran dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.

Hasil Deskriptif Penelitian

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat gambaran nilai variabel penelitian dengan melihat nilai minimal dan maksimal, *mean* dan standar deviasi data masing – masing variabel penelitian [31]. Berdasarkan nilai masing – masing variabel penelitian, berikut ini adalah hasil analisis deskriptif seluruh variabel yang diteliti dalam penelitian ini :

Tabel 1 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	63	0.001	2815.818	127.968	509.074
Belanja_Daerah	63	4.593	1081.190	92.338	210.704
<i>Budget_Ratcheting</i>	63	-90.604	218.034	2.797	34.283

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada Tabel 1 di atas, diperoleh gambaran data variabel penelitian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 1 di atas diperoleh gambaran bahwa variabel realisasi Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimal 0,001 dan maksimal 2.815,818 dengan *mean* 127,968 dan standar deviasi yaitu 509,074. Nilai standar deviasi variabel realisasi Pendapatan Asli Daerah melebihi nilai rata-rata (*mean*) menunjukkan bahwa data variabel independen memiliki distribusi yang tidak normal karena terlalu banyak memuat fluktuasi.

2. Belanja Daerah

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 1 di atas diperoleh gambaran bahwa variabel realisasi Belanja Daerah memiliki nilai minimal 4,593 dan maksimal 1.081,190 dengan *mean* 92,338 dan standar deviasi adalah 210,704. Nilai standar deviasi variabel realisasi Belanja Daerah melebihi nilai rata-rata (*mean*) menunjukkan bahwa data variabel dependen memiliki distribusi yang tidak normal karena terlalu banyak memuat fluktuasi.

3. *Budget Ratcheting*

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 1 di atas diperoleh gambaran bahwa variabel realisasi *Budget Ratcheting* memiliki nilai minimal -90,604 dan maksimal 218,034 dengan *mean* 2,797 dan standar deviasi yaitu 34,283. Nilai standar deviasi variabel realisasi *Budget Ratcheting* melebihi nilai rata-rata (*mean*) menunjukkan bahwa data variabel moderasi memiliki distribusi yang tidak normal karena terlalu banyak memuat fluktuasi.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear sederhana meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Berikut ini adalah hasil uji asumsi klasik model regresi yang akan diestimasi dalam penelitian ini :

- Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi residual dari model regresi, jika residual berdistribusi normal maka model dapat dianalisis dengan analisis regresi, namun jika residual tidak berdistribusi normal maka model tersebut tidak dapat dianalisis dengan analisis regresi.

Uji normalitas dapat dilakukan secara statistik dengan menggunakan uji normalitas *Kolmogorv Smirnov*, dalam pengujian ini residual hasil regresi dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikan hasil pengujian melebihi 0,05. Berikut ini adalah hasil dari uji normalitas *Kolmogorv Smirnov* dengan bantuan program SPSS :

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		63	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.85790680	
Most Extreme Differences	Absolute	.113	
	Positive	.096	
	Negative	-.113	
Test Statistic		.113	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.045 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.374 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.362
		Upper Bound	.387

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525.

Sumber : Hasil Output SPSS (data diolah)

Hasil uji normalitas pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan hasil uji normalitas *kolmogorv smirnov* adalah sebesar 0,374^d. Oleh karena nilai signifikansi yang diperoleh > 0,05 maka disimpulkan bahwa residual regresi memiliki sebaran data berdistribusi normal.

- **Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) [32]. Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai VIF < 10,00 dan *tolerance* > 0,1 maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PAD	.967	1.034
	Budget_Ratcheting	.358	2.793
	PAD_BudgetRat	.365	2.738

Dependen Variabel: Belanja daerah

Sumber : Hasil Output SPSS (data diolah)

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa nilai VIF variabel PAD adalah 1,034, variabel *Budget Ratcheting* yaitu 2,793 dan variabel *PAD_BudgetRatcheting* sebesar 2,738. Seluruh nilai VIF variabel < 10,00 dan nilai *tolerance* seluruh variabel telah melebihi 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi multikolinearitas.

- **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji Heteroskedastisitas dapat dilakukan secara statistik, yaitu dengan menggunakan Uji Glejser. Dalam pengujian ini, model dinyatakan terbebas dari heteroskedastisitas jika nilai signifikansi seluruh variabel > 0,05.

Tabel 4 Uji Heterokedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	.655	.071		9.162	.000
	<i>Budget_Ratcheting</i>	-1.500E-12	.000	-.095	-.448	.656
	<i>PAD_BudgetRat</i>	-1.510E-25	.000	-.014	-.066	.947
	PAD	8.887E-14	.000	.084	.648	.520

a. Dependen Variabel: abs

Sumber : Hasil Output SPSS (data diolah)

Hasil uji Glejser pada tabel 4 di atas menunjukkan bahwa variabel *Budget Ratcheting* mempunyai nilai sebesar 0,656, variabel *PAD_BudgetRatcheting* dengan nilai sebesar 0,947 dan variabel PAD yaitu 0,520. Seluruh variabel di atas pada model regresi memiliki nilai signifikansi uji Glejser > 0,05 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

- **Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Salah satu uji untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat menggunakan *Durbin Watson*. Nilai statistik dari *Durbin-Watson* (DW) dapat berkisar dari 0 hingga 4 [33]. Apabila nilai *Durbin Watson* yang diperoleh berada pada interval $du - (4-du)$ pada tabel *Durbin Watson* maka dinyatakan bahwa tidak ada autokorelasi. Nilai *Durbin Watson* > 2,000 menunjukkan model sudah pasti tidak mengalami autokorelasi.

Tabel 5 Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.843 ^a	.711	.696	.87945	2.115

a. Predictors: (Constant), PAD_BudgetRat, PAD, Budget_Ratcheting

b. Dependent Variable: Belanja daerah

Sumber : Hasil Output SPSS (data diolah)

Hasil analisis pada tabel 5 di atas menunjukkan nilai *Durbin Watson* model regresi sebesar 2,115 oleh karena nilai *Durbin Watson* telah melebihi 2,000 maka dapat dinyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model regresi.

Berdasarkan keseluruhan hasil uji asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa seluruh asumsi klasik telah terpenuhi dalam model regresi ini, sehingga model regresi layak digunakan untuk menguji pengaruh PAD_BudgetRatcheting, PAD, Budget Ratcheting terhadap Belanja daerah.

Uji Regresi Linear Sederhana

Tabel 6 Uji Regresi Linear Sederhana
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	17.424	.566		30.795	.000
	PAD	.327	.029	.806	11.319	.000

a. Dependent Variable: Belanja daerah

Sumber : Hasil Output SPSS (data diolah)

Berdasarkan hasil pengolahan data sesuai tabel 6 dapat dijelaskan dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

$$Y = 17,424 + 0,327X + e$$

Dimana :

Y = Belanja daerah

X = Pendapatan Asli Daerah

b = Konstanta

e = Standar error

Dari persamaan regresi linear sederhana yang terbentuk dapat dijelaskan mengenai hubungan antar variabel independen dan dependen antara lain sebagai berikut :

1) Konstanta (a)

Nilai konstanta sebesar 17,424 menjelaskan bahwa jika variabel independen yakni Pendapatan Asli Daerah (x) bernilai 0 atau konstan, maka nilai dari variabel dependen berupa Belanja Daerah (y) memiliki hasil tetap senilai 17,424.

2) Pendapatan Asli Daerah (x)

Koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah (x) bernilai 0,327 sehingga diartikan bahwa apabila variabel Pendapatan Asli Daerah (x) mengalami peningkatan satu satuan maka akan diikuti meningkatnya variabel Belanja Daerah (y) sebesar 0,327.

Uji Hipotesis

Hasil analisis regresi linear sederhana meliputi hasil uji pengaruh parsial (uji t), dan koefisien determinasi (R square). Hasil uji Parsial (uji t) dapat digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

- Uji Parsial (Uji t)

Dalam analisis regresi linear sederhana, uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 7 Hasil Uji Parsial (uji t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	17.424	.566		30.795	.000
	PAD	.327	.029	.806	11.319	.000
	<i>Budget_Ratcheting</i>	-1.108E-11	.000	-.238	-2.035	.056
	PAD <i>BudgetRat</i>	-5.513E-24	.000	-.174	-1.501	.139

a. Dependen Variabel: Belanja daerah

Sumber : Hasil Output SPSS (data diolah)

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel di atas, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi pengaruh PAD terhadap belanja daerah adalah sebesar 0,000 oleh karena nilai sig. < 0,05 dan koefisien regresi positif sebesar 0,327 maka disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, artinya bahwa semakin tinggi PAD yang diperoleh maka akan semakin tinggi pula belanja daerah.
2. Nilai signifikansi pengaruh *budget ratcheting* terhadap belanja daerah adalah sebesar 0,056 oleh karena nilai sig. > 0,05 dan koefisien regresi negatif sebesar -1.108E-11 maka disimpulkan bahwa *budget ratcheting* berpengaruh negatif terhadap integritas belanja daerah, artinya bahwa semakin tinggi *budget ratcheting* maka belanja daerah semakin menurun.
3. Efek moderasi *budget ratheting* pada hubungan PAD terhadap belanja daerah adalah sebesar 0,139 oleh karena nilai sig. > 0,05 dan koefisien regresi negatif -5,513E-24 maka disimpulkan bahwa *budget ratcheting* tidak memoderasi pengaruh PAD terhadap belanja daerah.

- **Koefisien determinasi (R Square)**

Dalam analisis regresi linear sederhana, koefisien determinasi menunjukkan besar pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dilihat dari nilai R Square untuk model dengan 1 variabel dependen, sedangkan pada model regresi dengan lebih dari 1 variabel dependen koefisien determinasi dilihat dari nilai *adjusted R square*.

Tabel 9 Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.843 ^a	.711	.696	.87945	1.616

a. Predictors: (Constant), PAD, *BudgetRatcheting*, PAD, *Budget_Ratcheting*

b. Dependen Variabel: Belanja daerah

Sumber : Hasil Output SPSS (data diolah)

Hasil analisis regresi pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *adjusted R Square* model regresi adalah sebesar 0,696. Hal ini menunjukkan bahwa besar pengaruh simultan PAD dan *Budget Ratcheting* terhadap Belanja daerah adalah sebesar 69,9% sedangkan sisanya sebanyak 30,1% dipengaruhi faktor lain di luar kedua faktor tersebut.

Persamaan MRATabel 10 Uji MRA
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	17.424	.566		30.795	.000
	PAD	.327	.029	.806	11.319	.000
	<i>Budget_Ratcheting</i>	-1.108E-11	.000	-.238	-2.035	.056
	PAD <i>BudgetRet</i>	-5.513E-24	.000	-.174	-1.501	.139

a. Dependen Variabel: Belanja daerah

Sumber : Hasil Output SPSS (data diolah)

Hasil analisis regresi pada Tabel 10 menunjukkan nilai konstanta regresi sebesar 17,424 dengan koefisien regresi PAD sebesar 0,327, koefisien regresi *Budget Ratcheting* sebesar -1.108E-11, koefisien regresi PAD_*BudgetRat* sebesar -5.513E-24. Berdasarkan nilai – nilai tersebut maka persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi belanja daerah berdasarkan ketiga variabel tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + e$$

$$Y = 17,424 + 0,327 X_1 + -1.108E-11 X_2 + -5.513E-24 X_3 + e$$

Dengan :

Y = Belanja daerah
a = Konstanta
X₁ = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X₂ = *Budget Ratcheting*
X₃ = PAD_*BudgetRatcheting*
e = Standar error

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini berdasarkan pada hasil analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana berikut adalah ringkasan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini :

Tabel 11 Hasil Pengujian Hipotesis

No	Hipotesis	Koefisien Regresi	t	Sig.	Kesimpulan
1	PAD berpengaruh terhadap belanja daerah	0.327	11.319	0.000	diterima
2	PAD_ <i>BudgetRat</i> berpengaruh terhadap belanja daerah	-5.513E-24	-1.501	0.139	tidak memoderasi

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan nilai signifikansi dari variabel pendapatan asli daerah (x) adalah $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti H₁ yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Artinya semakin tinggi jumlah pendapatan asli daerah maka akan diikuti peningkatan jumlah belanja daerah. Nilai koefisien regresi pendapatan asli daerah sebesar 0,327 memiliki makna apabila pendapatan asli daerah naik 1% maka pengalokasian belanja daerah juga akan naik sebesar 0,327% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hasil penelitian ini seirama dengan penelitian yang dilakukan oleh [19], [8], [17] dan [16] yang menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa setiap adanya kenaikan pendapatan asli daerah akan disertai dengan naiknya jumlah belanja daerah.

Budget Ratcheting Memoderasi Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah

Berdasarkan persamaan regresi di atas diketahui bahwa nilai koefisien *budget ratcheting* sebesar -1.108E-11 memiliki arti apabila *budget ratcheting* naik sebesar 1% maka pengalokasian belanja daerah akan turun sebesar 1.108E-11. Pengujian hipotesis kedua (H₂) menunjukkan hasil bahwa variabel interaksi antara pendapatan asli daerah dengan *budget ratcheting* sebesar 0,139 dan tingkat signifikansi $0,139 > \alpha = 0,05$ sehingga variabel *budget ratcheting* tidak memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah. Nilai koefisien regresi PAD_*Budget Ratcheting* sebesar -5.513E-24 hal ini bermakna efek moderasi yang dihasilkan yaitu negatif, artinya semakin tinggi moderasi *budget ratcheting* maka pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah menurun. Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh [21] yang menjelaskan bahwa kenaikan pendapatan asli daerah tidak dibarengi dengan kenaikan belanja modal sehingga *budget ratcheting* tidak memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah dan belanja daerah. Hasil penelitian dari [22] juga menjelaskan bahwa tidak adanya pengaruh antara pendapatan asli daerah dengan belanja barang dan jasa sehingga *budget ratcheting* memperlemah hubungan antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah.

Pada penelitian ini didapatkan hasil walaupun pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah memiliki pengaruh positif akan tetapi efek *budget ratcheting* tidak memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah dan belanja daerah. Hal ini dikarenakan dalam masa pandemi *covid-19* terjadi penurunan jumlah pendapatan asli daerah yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelum adanya pandemi *covid-19*, sehingga keadaan tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap hubungan pendapatan asli daerah dengan belanja daerah. Penurunan pendapatan asli daerah disebabkan menurunnya tingkat perekonomian secara global karena adanya pemberlakuan pembatasan

kegiatan masyarakat (PPKM), sedangkan belanja daerah banyak dipergunakan untuk membiayai dan berfokus pada kegiatan untuk menyelamatkan dan mengatasi penyebaran *covid-19*.

IV. SIMPULAN

Dari hasil pengujian dan pembahasan yang telah dijelaskan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini berarti semakin tinggi kenaikan pendapatan asli daerah akan dibarengi dengan meningkatnya belanja daerah. Pendapatan asli daerah yang didapat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat guna mendukung pertumbuhan perekonomian daerah.
2. *Budget ratcheting* adalah variabel moderasi yang memiliki fungsi memperkuat atau memperlemah hubungan antara pendapatan asli dengan belanja daerah. Hasil penelitian disimpulkan bahwa *budget ratcheting* tidak memoderasi atau memperlemah hubungan antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah. Hal ini dikarenakan terjadi penurunan jumlah pendapatan asli daerah yang diakibatkan oleh wabah *covid-19*. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya - upaya untuk membangkitkan perekonomian rakyat dengan cara mendukung kegiatan umkm masyarakat dan mengembangkan potensi sumber – sumber pendapatan daerah [34].

Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan yang dihadapi peneliti dalam penelitian ini, antara lain :

1. Data sekunder (laporan realisasi anggaran) yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya 2 periode yaitu tahun 2020 dan 2021 karena fokus dari penelitian yaitu paska pandemi *covid-19*.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel pendapatan asli daerah dan variabel *budget ractheting*. Sementara itu, masih terdapat banyak variabel lain, contohnya : variabel pertumbuhan ekonomi dan efektivitas kinerja yang dapat dijadikan variabel dengan kemungkinan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap belanja daerah.

Saran

1. Saran untuk penelitian selanjutnya :
 - a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data sekunder beberapa periode tahun anggaran.
 - b. Agar peneliti selanjutnya memberikan tambahan pada variabel bebas lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini, serta dapat memberikan tambahan variabel moderasi.
2. Saran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo :
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan memberdayakan umkm yang ada di Sidoarjo dan mengoptimalkan sumber-sumber daya penghasil pendapatan asli daerah agar pembangunan daerah berjalan pesat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Sidoarjo.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terutama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang telah bersedia memberikan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran guna mendukung hasil penelitian ini.

REFERENSI

- [1] *Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.*
- [2] P. Hastuti, “Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia,” *Simp. Nas. Keuang. Negara*, vol. 1, no. 1, pp. 785–787, 2018, [Online]. Available: <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/293>
- [3] *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*
- [4] S. BIDURI, “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Variabel Pemoderasi Gaya Kepemimpinan Dan Komitmen Organisasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan,” *Manajerial*, vol. 1, no. 1, p. 80, 2018, doi: 10.30587/jurnalmanajerial.v1i1.430.
- [5] R. N. Pratiwi, “Politisasi anggaran sektor publik,” *J. Interkatif Univ. Brawijaya*, vol. 1, p. 2, 2010.
- [6] “Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” *J. Media Huk.*, p. 184, 2019.

- [7] A. W. A. dan Y. Septriani, "Konflik Keagenan: Tinjauan Teoritis dan cara Mengurangnya," *J. Akunt. Manaj.*, vol. 3, no. 2, pp. 47–55, 2008.
- [8] S. Abdullah and A. Junita, "Bukti Empiris Tentang Pengaruh Budget Ratcheting Terhadap Hubungan Antara Pendapatan Sendiri Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Aceh," *Modus*, vol. 28, no. 2, p. 185, 2016, doi: 10.24002/modus.v28i2.850.
- [9] Y. R. Pratiwi, "Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19," *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. 2022. [Online]. Available: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html>
- [10] BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, "Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo Turun Hingga Rp 583,4 Miliar."
- [11] H. Kusniawati and I. A. Lahaya, "Pengaruh Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran, Asimetri Informasi terhadap Budgetary Slack pada SKPD Kota Samarinda," *Akuntabel*, vol. 14, no. 2, p. 144, 2018, doi: 10.29264/jakt.v14i2.1904.
- [12] *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease* .
- [13] H. Muchlison, "Taget PAD 2022 Sidoarjo Naik 200 Milyar," 2021. [Online]. Available: <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/14/12/2021/target-pad-2022-sidoarjo-naik-rp-200-miliar/>
- [14] P. A. & E. I. Wulandari, "Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah - Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie - Google Books," *Deepublish*. 2018. [Online]. Available: https://books.google.co.id/books?id=c1tHDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pajak+daerah+dalam+pendapatan+asli+daerah&hl=ban&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=pajak+daerah+dalam+pendapatan+asli+daerah&f=false
- [15] A. Darmanto, "Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kutai Timur," *eJournal Ilmu Adm. Bisnis*, vol. 4, no. 1, pp. 15–25, 2016.
- [16] N. Nurhayati, "Pengaruh Budget Ratcheting Terhadap Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Wilayah III Cirebon," *JRKA*, vol. 6, no. September, 2017.
- [17] Putri Intan Permata Sari, R. A. Wijaya, D. Saputra, and A. M. Yudha, "Efek Ratchet Dalam Anggaran Pendapatan Dan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Barat," *JAK (Jurnal Akuntansi) Kaji. Ilm. Akunt.*, vol. 9, no. 1, pp. 34–44, 2022, doi: 10.30656/jak.v9i1.3644.
- [18] A. M. Arsani and P. R. Sihombing, "Budget Ratcheting in Indonesia and The Implementation of Performance-Based Budgeting System During Pandemic," *J. Mantik*, vol. 4, no. 1, pp. 172–180, 2020.
- [19] K. G. Rahman, "Budget Ratcheting pada Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah: Studi Kasus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barru," *IMPREST J. Ilm. Akunt.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–7, 2022, doi: 10.37476/imprest.v1i1.2971.
- [20] F. N. Hanifah and Z. Zulfikar, "Budget Bias in District and City Governments in Central Java Province," vol. 6, no. 3, pp. 38–48, 2022.
- [21] A. N. Hidayah and V. F. Sari, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Budget Ratcheting Sebagai Variabel Moderating," *J. Eksplor. Akunt.*, vol. 4, no. 1, pp. 165–177, 2022, doi: 10.24036/jea.v4i1.485.
- [22] M. dan V. F. Sari, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Barang dan Jasa dengan," vol. 4, no. 2, pp. 248–260, 2022.
- [23] D. Lim, *Budget Ratcheting and Agency Problem*. 2011.
- [24] Y. S. Choi, M. O. Kim, H. R. Jung, and H. Cho, "Bargaining power and budget ratcheting: Evidence from South Korean local governments," *Manag. Account. Res.*, vol. 53, no. August 2018, p. 100767, 2021, doi: 10.1016/j.mar.2021.100767.
- [25] Z. Apriyantini and Y. A. Aryani, "Rebudgeting: Dampak Ratcheting Anggaran Terhadap Pencapaian Mutu Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan Se-Wilayah Kota Madiun," *Assets J. Akunt. dan Pendidik.*, vol. 3, no. 2, p. 75, 2014, doi: 10.25273/jap.v3i2.1213.
- [26] E. T. Pratiwi, R. Abdullah, L. O. D. Abdullah, and A. Dja'wa, "The Effect of Budget Ratcheting on Financial and Non-Financial Performance," *Adv. Econ. Bus. Manag. Res.*, vol. 120, no. Icmeb 2019, pp. 23–27, 2020, doi: 10.2991/aebmr.k.200205.006.
- [27] B. Rivaldo Manbait, "Peran Budget Ratcheting sebagai Pemoderasi Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal: Implikasinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat," STIE Yogyakarta, 2021. [Online]. Available: repository.stieykp.ac.id
- [28] C. Aranda, "Ratcheting Effect and The Role of Relative Target Setting," *Work. Pap. Univ. Navarra, Spain*, no. <https://research.mbs.ac.uk/accounting->

- finance/Portals/0/docs/RatchingEffectandtheRoleofRelativeTargetSetting.pdf, 2010.
- [29] E. W. Ningdiyah, *Pelatihan Olah Data SPSS*. 2022.
- [30] M. S. dan N. M. N. Najmudin, Lc., ME, Dr. Syihabuddin, M.Si, Dr. Ma'zumi, M.Ag, Isti Nuzulul Atiah, Lc., MA.Ek, Sujai, S.Ag., *Teori Planned Behavior dan Asuransi Syariah*. 2022.
- [31] S. Amelia, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota di Provinsi Aceh)," *J. Ekon. dan Bisnis, Vol. 11 No. 2 Sept. 2022*, vol. 11, no. 2, 2022.
- [32] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. 2011.
- [33] G. Pramesti, *Spss 18.0 Dalam Rancangan Percobaan*. 2011.
- [34] I. P. Ngurah and P. Kartika, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi," *E-Journal Akunt. Univ. Udayana*, vol. 1, pp. 79–92, 2014.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.